

POLA DAN ARAH PENDIDIKAN ISLAM MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Legimin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

legiminsingkawang@gmail.com

Aslan ^{*1}

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

aslanalbanjary066@gmail.com

ABSTRACT

The history of the Indonesian nation's journey, cannot be separated from the role of the Muslim community, especially in the struggle to expel invaders from the face of the Indonesian earth. Through the education sector, Islamic leaders established Islamic education to strengthen the foundations of religion and for the people to fight the education system brought by the Dutch colonialists. The Islamic education system is the only formal education that has its own system and management which is different from the education system brought by the Netherlands. The Dutch government regulations that are so strict and harsh on the activities of madrassas and Islamic boarding schools in Indonesia, do not make Islamic education paralyzed and in ruins. On the other hand, the spirit of Islam was still well preserved, where the ulama and kyai were non-cooperative with the Dutch and they moved away from places close to the Dutch. Similar pressure was experienced by the Islamic education system during the Japanese education era. Where the Japanese government requires teachers to learn Japanese and obliges the Tenno (Emperor) to respect. The strength of the principles of Islamic educator leaders has shown the ability of Islamic education to survive in accordance with Islamic principles, without the influence of any power that is in power.

Keywords: Islamic education; Colonial period; Colonial Pressure.

ABSTRAK

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak terlepas dari peran umat Islam, khususnya dalam perjuangan mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Melalui bidang pendidikan, para tokoh-tokoh Islam menetapkan pendidikan Islam untuk memperkuat pondasi agama dan bagi rakyat untuk melawan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sistem pendidikan Islam menjadi satu-satunya pendidikan formal yang memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda. Peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras terhadap aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, tidak membuat pendidikan Islam menjadi lumpuh dan porak poranda. Sebaliknya, jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik, di mana para ulama dan kyai bersikap non cooperative dengan Belanda dan mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Tekanan yang serupa dialami sistem pendidikan Islam di jaman pendidikan Jepang. Di mana pemerintah Jepang mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dan mewajibkan hormat kepada Tenno (Kaisar). Kekuatan prinsip para ulama tokoh pendidik Islam telah menunjukkan kemampuan pendidikan Islam bertahan sesuai dengan prinsip Islam, tanpa pengaruh dari kekuatan manapun yang sedang berkuasa.

¹ Korespondensi Penulis

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Masa Penjajahan; Tekanan Penjajah

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari umat Islam, termasuk dalam perjuangan mengusir penjajah. Umat Islam sebagai umat yang mayoritas dalam negeri ini tentunya mempunyai tanggungjawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan para tokoh-tokoh Islam menetapkan fondasi pendidikan Islam yang di masa penjajahan tidak terakomodir oleh pemerintah penjajah. Pendidikan Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran terutama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah penjajah. Karena itu para tokoh Islam mendirikan sekolah dan menampung orang-orang Islam untuk diberikan pendidikan Agama Islam (Harun, 1992:90).

Sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan memperkenalkan sekolah-sekolah dan sistem modern sebagaimana berkembang di Barat, Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan formal yaitu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam selaku satu-satunya pendidikan formal yang ada pada masa itu memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda (Mahmud Yunus.1985:307).

Pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dikelompokkan kedalam dua priode, yaitu periode VOC (Vereenigde Oost- indische Compagnie) dan priode pemerintah Hindia Belanda (NederlandsIndie). Pada periode VOC, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yaitu berdasarkan untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. VOC tidak segan-segan untuk berperang bila ada yang menghalangi tujuan mereka. Ini bisa diperhatikan dari hak aktroinya yang terdapat dalam suatu pasal yang berbunyi: “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah (Arif Subhan, 2012: 45). Hal ini menyebabkan terpecahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Di satu pihak adanya pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Di pihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak mepedulikan agama.

Pecahnya sistem pendidikan di Indonesia tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Di satu sisi diperlukan pemahaman untuk mengetahui perkembangan dunia luar dengan metode dan teknologi yang dikembangkan oleh barat. Di sisi lain juga dibutuhkan pemahaman keagamaan sebagaimana telah ditanamkan sebelum VOC datang ke Indonesia. Untuk memadukan dua sistem ini kemudian muncul madrasah- madrasah yang berkelas, memakai bangku dan meja yang dipelopori oleh para pembaharuan di Indonesia.

Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia, bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Sejak tahun 1940 Jepang berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya. Dalam rencana tersebut Jepang menginginkan menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah mansyuria, daratan Cina, kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand.

Oleh karena itu rencana “kemakmuran bersama Asia Raya” dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan semboyan “Asia untuk bangsa Asia” Jepang menguasai daerah yang

berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% timah dunia. Indonesia yang kaya sumber bahan mentah merupakan sasaran yang perlu dibangun dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Sehingga Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air Indonesia merupakan sumber bahan-bahan mentah yang kaya raya dan tenaga manusia yang banyak tersebut sangat besar artinya demi kelangsungan perang pasifik, dan hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya (Zuhairini.2011:146-150)

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, maupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta, dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayidin Panotogomo. Menurut Zuhairini, (2011:146), pada zaman Sultan ini, hitungan tahun Saka diasimilasikan dengan tahun Hijriyah yang berlaku di seluruh negara. Sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosh menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah- sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah (Abdul Rachman Shaleh, 2004: 14-15)

Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dan di tiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: “Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara” (Zuhairini dkk., 2011:148)

Jiwa dari surat edaran di atas menggambarkan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok pesantren, masjid, mushalla, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Bahkan, para santri pondok masih dianggap buta huruf latin. Dengan demikian para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat.

Menurut Samsul Nizar (2008:307-308) politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut “Priesterraden.” Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan

yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (baca: pengajian) harus minta izin terlebih dahulu.

- b) Kemudian pada tahun 1925 M pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad, dan lain-lain.
- c) Pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda.

Jika dicermati peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam waktu yang tidak lama pendidikan Islam di Indonesia akan menjadi lumpuh dan porak poranda. Akan tetapi, apa yang disaksikan sejarah adalah kenyataan sebaliknya. Jiwa Islam tetap terpelihara dengan baik. Para ulama dan kyai bersikap *non cooperative* dengan Belanda dan mereka pun menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda (Zuharini, 2011:146-150)

Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam di sebut juga dengan bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu:

- 1) Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam; Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi murid-muridnya. yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaanya. adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata.
- 2) Sistem pendidikan surau (langgar)
Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (Urang Siak) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimak dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah halaqoh.
- 3) Sistem Pendidikan Pesantren

Metode yang digunakan adalah metode sorogan, atau layanan individual yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiyai, kemudian kiyai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Metode wetonan dan bandongan, atau layanan kolektif ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kyai sambil membuat catatan penjelasan di penggir kitabnya. Metode Musyawarah Adalah belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran-pelajaran santri ditingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiyainya. Kiyai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. (Ramayulis, 2011: 253-258).

Kurikulum Pesantren Menurut Karel A Steenbrink (1984:39) semenjak akhir abad ke-19 pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan misalnya oleh LWC Van Den Berg (1886) seorang pakar pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya dengan para kiyai, dia mengkompilasi kitab kuning meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, ushuludin, tasawuf dan tafsir. Dari hasil penelitian Van De Berg tersebut, Karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain kitab-kitab yang dipakai di pesantren hampir semuanya berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pada umumnya pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Namun sekalipun mengutamakan pelajaran fikih mata pelajaran lainya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Pengajaran bahasa Arab adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab agama. Pengajaran bahasa Arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan tingkatan sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab dengan begitu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksudkan itu adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa Arab. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja.

Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan pendidikan Islam tersebut memengaruhi sekolah-sekolah swasta lainnya. Adanya latar belakang tersebut pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, dikeluarkan ordonansi tanggal 28 Maret 1932 Lembaran Negara no 136 dan 260 isinya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Sistem ini tidak memberi

keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan. Dengan kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya “sesuatu” yang akan merugikan Agama Islam jika kebijakan ini dilaksanakan. Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun kebijakan ordonansi guru tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan hilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil. (Ramayulis, 2011:274-275).

Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan: “Asia Timur Raya untuk Asia.” Pada babak pertamanya pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Untuk mendekati umat Islam Indonesia mereka menempuh berbagai kebijaksanaan, antara lain:

1. KUA (Kantor Urusan Agama) yang pada zaman Belanda disebut Voor Islamistische Saken yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang, Jawa Timur.
2. Pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang.
3. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentuka barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam.
4. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Mohammad Hatta.
5. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA).
6. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Maksud dari pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Dunia pendidikan yang seharusnya dikembangkan tetapi secara umum terbengkalai. Para siswa di sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan pengajaran yang layak sebagaimana mestinya (Zuharini, 2011:150-152).

Adapun tujuan pendidikan masa penjajahan Jepang secara garis besar meliputi 2 hal pokok, yaitu untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang.

Tujuan pendidikan yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang antara lain:

- 1) Asas tujuan Muhammadiyah: mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan asas perjuangannya dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar.
- 2) I.N.S (Indonesische Nederlanshe School) dipelopori oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899-1969, yang bertujuan mendidik anak agar berpikir rasional, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan.
- 3) Tujuan Nahdlatul Ulama, sebelum menjadi partai politik, memegang teguh empat mazhab, di samping mengerjakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. (Rohidin, 2004:19).

Ramayulis (2011: 279) mengatakan bahwa, sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang:

- 1) Pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatra yang terkenal dengan madrasahnyanya, yang diilhami oleh majlis ulama tinggi.
- 2) Pendidikan agama di sekolah Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah
- 3) Perguruan tinggi Islam Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan seikere (menghormati kaisar jepang yang dianggap keturunan dewa matahari).

Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan. Ramayulis juga menyimpulkan bahwa, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti, bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

Ada satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk

kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan harus mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan Belanda yakni pendidikan masa penjajahan Belanda bersifat lebih liberal namun terbatas untuk kalangan tertentu saja, sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi tidak ada tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari sisi keilmuan maupun mutu murid dan guru. Kondisi ini tidak terlepas dari target pemerintah Jepang melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan memelopori dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang diimpi-impikan Jepang. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno (Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari (Omiterasi Omikami). Sistem penghormatan kepada Kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno, disebut dengan Seikeirei. Penghormatan Seikeirei ini, biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (kimigayo). Tidak semua rakyat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan Agama. Penerapan Seikeirei ini ditentang umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singaparna (Hasbullah, 1996:116-117).

KESIMPULAN

Dari uraian makalah di atas, dapat dipahami intisari dari pendidikan Islam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bahwa Pendidikan pada Islam masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap Umat Islam yang sudah mulai berkembang.

Sementara pada saat Jepang berkuasa pendidikan Islam sedikit lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi Jepang dengan misinya, mewajibkan guru untuk belajar bahasa Jepang dalam memberikan pelajaran dan mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, termasuk mewajibkan hormat kepada Tenno (Kaisar). Inilah yang oleh tokoh Islam tidak diterima akhirnya mereka ditangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Amir, Wirjosukrto.1985. Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran
 Hasbullah. 1996. Kapita Selektta Pendidikan Islam. Jakarta: RajaGrafindo
<http://nieez-azza.blogspot.com/2012/05/makalah-pendidikan-islam-pada-masa.html>, di unduh hari senin 9 Oktober 2018 pkl. 06:00.
<http://our-ed.blogspot.com/2012/05/pendidikan-di-zaman-penjajahan-jepang.html> diunduh hari senin 9 Oktober 2018 pkl 0645.
 Islam, cet. Iv. Jember: Muria Offset.
 Jalaluddin. 1990. Kapita Selektta Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia
 Nasution, Harun. 1992. Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan.

- Nizar, Samsul (ed). 2008. Sejarah Pendidikan Islam “Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia. Jakarta: Kencana Persada.
- Ramayulis. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramayulis. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia. Zuhairini, dkk. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa “Visi, Misi dan Aksi,” Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Steenbrink, A Karel. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subhan, Arief. 2012. Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-20 “Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Rohidin FZh. 2004. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Yunus, Mahmud. 1985. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hadikarya.
- Joni Wilson Sitopu et al., “THE IMPORTANCE OF INTEGRATING MATHEMATICAL LITERACY IN THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM: A LITERATURE REVIEW,” *International Journal of Teaching and Learning* 2, no. 1 (January 4, 2024): 121–34.
- Meli Antika, Aslan, and Elsa Mulya Karlina, “PENERAPAN METODE PEMBIASAAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PADA ANAK KELOMPOK B1 DI TKIT YA BUNAYYA SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022-2023,” *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 7, no. 1 (January 17, 2024): 25–33.
- Tiara Nur Afni Nur Afni, Aslan Aslan, and Astaman Astaman, “PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN FIQIH DI KELAS IV MIS DARUL IHSAN SEPINGGAN PASCA KEBAKARAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023,” *Lunggu Journal* 2, no. 1 (January 22, 2024): 137–47.
- Bucky Wibawa Karya Guna et al., “Building Morality and Ethics Through Islamic Religious Education In Schools,” *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)* 5, no. 1 (February 9, 2024): 14–24, <https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>.
- Annisa Tri Rezeki and Aslan, “PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDIA,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 4, no. 1 (February 11, 2024): 57–63.
- Eliyah dan Aslan, “STAKE’S EVALUATION MODEL,” *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 2, no. 1 (14 Februari 2024): 27–39.